

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, propinsi, dan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Kemasan kegiatan pemerintah dan program-program pembangunan dilakukan melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Kewenangan yang besar ini tentunya memiliki implikasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan serangkaian persiapan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah sendiri.

Pemerintah daerah tentunya harus siap dengan segala konsekuensinya untuk memikul tugas dan tanggungjawab mengatur seperangkat sumber-sumber dana

dan daya dalam meningkatkan pelayanan kepada publiknya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya di dalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui UU No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat lebih ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya yang semakin meningkat.

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi

pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002).

Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pembangunan dan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Kompas dalam Ruth 11 Agustus 2000).

Penelitian yang mengkaji kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dibuat Ruth (2005). Peneliti merasa perlu melakukan penelitian kembali mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintah kota Tebing Tinggi untuk membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya sama atau berbeda. Penelitian ini dimaksud untuk melihat konsistensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah yang berbeda. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitian dan waktu penelitian. Pada penelitian sebelumnya tempat penelitian berada di kota Pematang Siantar dan menggunakan data tahun 2002-

2006 kemudian penelitian selanjutnya meneliti dikota Tebing Tinggi dan data yang digunakan tahun 2006-2011.

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa kontribusi PAD memiliki peranan yang begitu besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Melihat latar belakang dan pentingnya kontribusi PAD terhadap APBD sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan mewujudkan kemandirian daerah dalam berotonomi, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul **“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kota Tebing Tinggi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar kontribusi dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap APBD?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap APBD?
3. Sektor-sektor mana saja dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan PAD dipemerintahan kota Tebing Tinggi?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar masalah yang ada tidak berkembang luas dan untuk mempermudah penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di kota Tebing Tinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap APBD?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti sehubungan dengan bidang yang diteliti,
2. Bagi Dinas terkait, Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi Dinas pendapatan kota Tebing Tinggi.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.